



PERUBAHAN RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2018 - 2023

(PERUBAHAN PERBUB No. 8 TAHUN 2022)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**
Jl. Kartini No. 02 Magetan
Email : koinfo@magetan.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Ketentuan Pasal 342, Ayat (1), huruf (c) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar. Lebih lanjut dinyatakan dalam Ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan perubahan mendasar adalah: (i) mencakup terjadinya bencana alam, (ii) goncangan politik, (iii) krisis ekonomi, (iv) konflik sosial budaya, (v) gangguan keamanan, (vi) pemekaran daerah, atau (vii) perubahan kebijakan nasional. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16). Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Semoga Perubahan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Kabupaten Magetan SMART yang merupakan kepanjangan dari “ Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil ” .

Magetan , September 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760520 199511 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	38
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran	42
Tabel T.C.25 . 1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
BAB VIII PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program yang dituangkan ke dalam strategi dan arah kebijakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RENSTRA ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). RENJA Perangkat Daerah merupakan perencanaan tahunan yang memuat kebijakan program kegiatan pembangunan, rencana kerja, kerangka pendanaan dan indikator kinerja baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16). Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah. Adapun secara detail beberapa dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 342, Ayat (4), dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Lebih lanjut dinyatakan dalam Ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan perubahan mendasar adalah: (i) mencakup terjadinya bencana alam, (ii) goncangan politik, (iii) krisis ekonomi, (iv) konflik sosial budaya, (v) gangguan keamanan, (vi) pemekaran daerah, atau (vii) perubahan kebijakan nasional; Berdasarkan ketentuan diatas dasar dari perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah adanya krisis ekonomi global sebagai dampak pandemic covid 19 sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap target-target indikator pembangunan daerah, kemudian perlunya penyesuaian dengan kebijakan yang tertuang didalam RPJMD 2018-2023.
2. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Dengan diterbitkannya peraturan tersebut jelas berdampak dengan berubah struktur keuangan yang ada di daerah ditambah dengan adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sehingga perlu penyesuaian di dokumen perencanaan dan penganggaran.

3. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah merubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah; Adanya Pandemi covid 19 ini sudah mengubah kebijakan perencanaan dan penganggaran di RKPD sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang sedianya dalam rangka percepatan pencapaian visi misi Kepala Daerah harus dikurangi anggarannya atau bahkan dialihkan anggarannya untuk penanganan wabah covid 19.
4. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan; Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 disusul dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintah daerah ada perubahan, agar dalam pelaksanaannya supaya bisa berjalan dengan baik perlu adanya perubahan SOTK dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.

Perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018—2023 ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan ke dalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ;
18. Peraturan Bupati Magetan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 19. Keputusan Bupati Magetan No. 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi - misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program bupati terpilih.
4. Melakukan perbaikan indikator dan target, serta perbaikan program dan indikasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi - misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang. Landasan Hukum. Maksud dan Tujuan. serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi. Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana. Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Telaahan Renstra . Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris :

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa.
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor.
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan pelengkapan kantor.
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian cuti kenaikan pangkat. pensiunan.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai.
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis(RENSTRA);
- l. Menganalisa data menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring. evaluasi hasil rencana kerja. realisasi fisik dan anggaran. sistem informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q. Mengkoordinasikan. menghimpun pelaksanaan penyusunan standart pelayanan (SP). Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- r. Menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP);dan

- s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah, informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan TIK, melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasikan, Layanan manajemen Data Informasi *e-Government*, Integrasi layanan publik, Layanan Keamanan Informasi *e-Government*,

Layanan sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan Nama *Domain* dan *Sub Domain* bagi lembaga, Pengembangan Sumber Daya TIK, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), dan Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* serta layanan terpadu implementasi *e-Government*;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* serta layanan terpadu implementasi *e-Government*;
 - c. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, kriteria penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan dan pengaturan penggunaan *bandwidth* untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - g. Fasilitasi penyelenggaraan *teleconference* Pemerintah Daerah;

- h. pengelolaan dan pengendalian penggunaan nama *domain* dan *sub domain* Pemerintah Daerah;
- i. perumusan bahan rumusan norma standar prosedur penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan aplikasi terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- j. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. penyusunan bahan standar pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- l. penyusunan bahan koordinasi, identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan aplikasi baik untuk kebutuhan internal maupun layanan publik;
- m. pengelolaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan, implementasi aplikasi dan pemeliharannya kepada unit pengguna;
- n. pengembangan integrasi aplikasi sistem informasi elektronik layanan publik;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

- (1) Seksi Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. melakukan pengolahan, *updating* dan analisis data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. melakukan penyusunan dan pengumpulan dan pengelolaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - d. melakukan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan statistik daerah untuk konsumsi publik melalui teknologi informasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.
- (2) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
 - a. melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
 - b. melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
 - c. melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. melakukan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - f. melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
 - g. melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - h. melakukan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - j. melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - k. melakukan pengamanan informasi elektronik;
 - l. melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

TATA KERJA

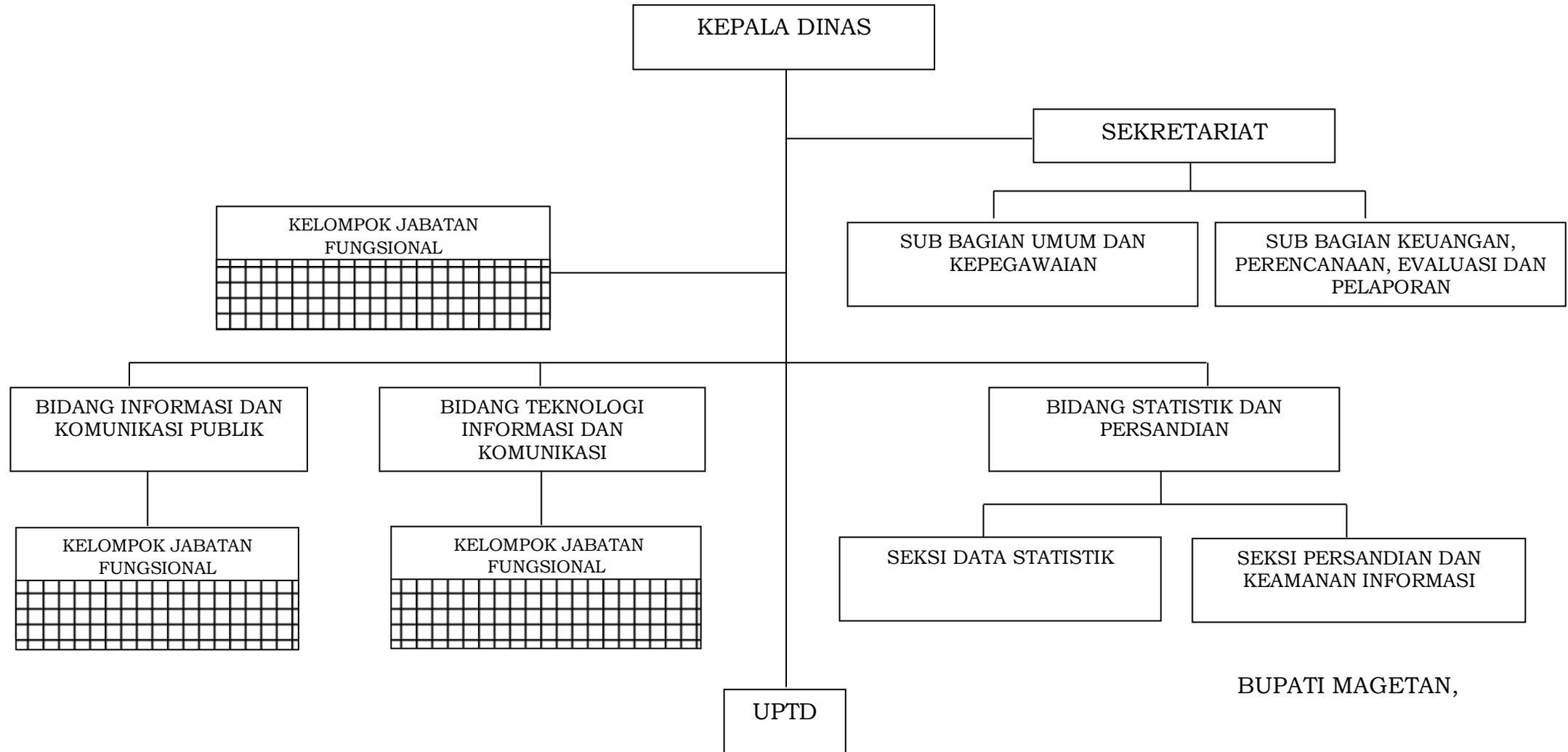
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terbagi menjadi 3 Bidang mempunyai 8 seksi dan 1 Sekretariat yang mempunyai 2 sub bagian. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dapat dilihat dibawah ini.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUTAEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (PNS) Dengan jumlah rincian sebagai berikut :

Tabel 1:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan Pangkat / Golongan :

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)		
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Kepala Dinas, Sekretaris
5	Pembina (IV/a)	2	Kabid
6	Panata Tingkat I (III/d)	3	Kasi, Kasubag
7	Penata (III/c)	8	Kabid, Kasi, Kasubag
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	Staf
9	Penata Muda (III/a)	9	Staf
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	Staf
11	Pengatur (II/c)	5	Staf
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)		Staf
13	Pengatur Muda (II/a)		
14	Juru Tingkat I (I/d)	-	
15	Juru (I/c)	-	
16	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
17	Juru Muda (I/a)	-	
Jumlah =		36	

Tabel 2 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang berdasarkan Jabatan/Eslon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Bidang	III.b	3
4	Kasubag	IV.a	2
5	Kasi	IV.a	6
6	Staf/pelaksana	-	23
Jumlah			36

Tabel 3 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan.

No	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM III	3	
2.	Diklat PIM IV	4	
Jumlah		7	

Tabel 4:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Rincian
1	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	1	1
2	S-2 MAGISTER SAINS	1	1
3	S.1 ILMU HUKUM	1	1
4	S.1 ADMINISTRASI NEGARA	2	2
5	S.1 EKONOMI STATISTIK	1	1
6	S.1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	2
7	S.1 KOMPUTER INFORMATIKA	2	2
8	S.1 KOMUNIKASI	2	2
9	S.1 TEKNIK INFORMATIKA	2	2
10	S.1 SISTEM INFORMASI	1	1
11	S.1 SOSIAL POLITIK UMUM	1	1
12	S.1 TEKNIK ELEKTRO	1	1
13	S1 ADMINISTRASI UMUM	1	1
14	S.1 EKONOMI AKUNTANSI	1	1
15	S.1 MANAJEMEN	1	1
16	SARJANA HUKUM	1	1
17	D-III SISTEM INFORMASI	1	1
18	D-III EKONOMI MANAJEMEN	1	1
19	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	1
20	D-III MIPA INFORMATIKA & KOMP.	2	2
21	D-III TEKNIK KOMPUTER	3	3
22	D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI	2	2
23	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1
24	SMA / IPS	1	1
25	SMA A.2 / BIOLOGI	2	2
26	SMA	1	1
Jumlah =		36	36

Tabel 5 :

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksinya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1.	AC Split	1	31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
2.	AC Unit	12	32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
3.	Alat Pemadam/Portable	1	33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
4.	Amplifier	1	34	Meja Komputer	5
5.	Antena VHF/FM Stationary	1	35	Meja Rapat	3
6.	Audio Filter	1	36	Meja Tulis	3
7.	Audio Tape Reel Recorder	1	37	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3
8.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	38	Microphone	1
9.	Calibration Exiter	1	39	Microscope	5
10	Camera Digital	1	40	Mixer	1
11	Compresor	1	41	Note Book	3
12	Concrete Mixer	1	42	P.C. Unit	19
13	Digital Audio Tape Recorder	1	43	Printer	11
14	Equalizer	1	44	Radio	1
15	Filling Besi/Metal	2	45	Radio Control	1
16	finger print	1	46	Recorder	2
17	Headphone	6	47	Sepeda Motor	7
18	Kabel listrik	2	48	Station Wagon	3
19	Kipas Angin	2	49	Tape Recoder	6
20	Kursi Biasa	10	50	Telephone Hybrid	1
21	Kursi kayu/Rotan/Bambu	8	51	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	52	Unit Pemancar MF/MW Portable	1
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	53	Unit Pemancar MF/MW Transportable	1
24	Kursi Lipat	16	54	Unit Pemancar SHF Transportable	1
25	Kursi Putar	8	55	Unit Power Supply	1
26	Kursi Tamu	3	56	Video Compact Disk (VCD)	1
27	Lampu Hias	1	57	LOUDSPEAKER	2
28	Lap Top	9	58	Meja Kayu/Rotan	11

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
29	LCD Proyektor	2	59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7
30	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	60	Lemari Kaca	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan sasaran/target Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan periode 2013-2018 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel Review Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tabel T-C. 23
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	Komunikasi dan Informatika																		
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	2,0	2,2	-	-	-	2,56	2,86	-	-	-	1,28	1,30	-	-	-
	Presentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan	-	-	-	40,00	50,00	-	-	-	36,36	92,73	-	-	-	0,91	1,85	-	-	-
	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	-	-	-	65,00	70,00	-	-	-	88,89	66,67	-	-	-	1,37	0,95	-	-	-
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	-	-	-	60	65	-	-	-	61,11	55,55	-	-	-	0,32	1,54	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B.	Urusan Statistik																		
	Presentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	-	-	-	60,00	70,00	-	-	-	45,45	49,09	-	-	-	0,76	0,70	-	-	-
C.	Urusan Persandian																		
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	-	-	-	292,000 Angka	300,000 Angka	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Magetan, September 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760520 199511 1 001

Berdasarkan penyajian tabel T-C.23 penjelasan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan terbagi dalam tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah sebelumnya menunjukkan bahwa ada sebagian indikator belum tercapai secara maksimal pada periode Renstra tahun 2019 dan 2020. Untuk indikator urusan bidang Persandian Tahun 2019 dan 2020 capaian indikator pun masih terbilang belum berhasil yaitu masi 0 %. Hal ini disebabkan karena kegiatan baru sebatas monitoring E-Government OPD, sosialisasi keamanan informasi dan belum bisa melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yaitu BSSN dikarenakan Pandemi Covid-19. Pada periode Perubahan Renstra tahun 2018-2023 mengajukan perubahan Indikator Kinerja di urusan Persandian yaitu mendasar pada peningkatan kebijakan tata kelola keamanan Informasi pada setiap perangkat daerah, dengan indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi “

Dalam rangka untuk mencapai target sasaran yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018 - 2023, sesuai dengan bidang urusannya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan untuk pencapaian target pada urusan Komunikasi dan Informatika, bidang urusan statistik, dan bidang urusan persandian dengan indikator sebagai berikut :

a. Pengembangan E-Government dalam pelayanan pemerintahan di Kabupaten Magetan di tingkat OPD, Kelurahan dan Desa

Pada tahun 2019 dengan 19,31% masih rendah dikarenakan masih dalam tahap proses sosialisasi terkait aplikasi – aplikasi, untuk data selengkapnya dapat dilihat dapat pada tabel berikut :

Tabel a.1
Persentase OPD, Kelurahan dan Desa yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Aplikasi	-	-	-	-	-	-	56	290
2.	Di bagi Jumlah OPD, Kelurahan dan Desa	OPD	-	-	-	-	-	-	290	290
3.	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	-	-	-	-	-	-	19,31	100,00

b. Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan informasi kepada masyarakat melalui media di majalah, radio, TV, media Online (Website), media Pertunjukan Rakyat, media interpelasi (ceramah/diskusi/lokakarya), media luar ruangan (booklet, Leaflet, brosur, buletin, spanduk, baleho), media Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan pameran. Dengan penyediaan informasi tersebut ditargetkan akhir RPJMD distribusi informasi kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik. Untuk realisasi ditahun 2020 hanya 6 media yang di laksanakan karena pandemi covid-19 Media cetak,Media radio,Media televisi,Media online,Media pertura, Media KIM (6 media yang bisa di realisasi karena pandemi covid-19) .

Tabel b.1
Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	88,89	66,67

c. Persentase Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Sektoral

Ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral Kabupaten Magetan tersaji dalam buku Data Dasar dan buku PDRB Kabupaten Magetan data tercatat sejak tahun 2013 baru mencapai 20% sampai dengan 2020 capaian kinerja sebesar 49,09%.

Tabel c.1
Persentase Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Sektoral

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah OPD Yang menyediakan Data Statistik Sektoral	OPD	11	14	14	17	17	22	25	27
2.	Jumlah OPD	Jumlah OPD	55	55	55	55	55	55	55	55
3.	Persentase Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Sektoral	%	20	25	25	30	30	40	45,45	49,09

d. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi

Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi merupakan ukuran atau nilai yang menggambarkan kesiapan, kelengkapan dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan regulasi, kebijakan, standar dan prosedur pengamanan informasi. Berikut penyajian data dari indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan

informasi baru terisi data capaian di tahun 2019 baru tercapai 9,09% dan 2020 tercapai 10,90%. Untuk di tahun berikutnya akan meningkatkan dengan upaya melaksanakan sosialisasi terhadap Perangkat Daerah akan pentingnya penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi.

Tabel d.1
 Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan
 Keamanan Informasi

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah OPD yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi	OPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5	6
3	Jumlah OPD	OPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	55	55
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	9.09	10.90

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	520.000.000	485.953.783	-	-	-	493.068.159	446.453.116	-	-	-	94,82%	91,87%	-	-	-	446.453.115	446.453.115
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.000.000	355.953.783	-	-	-	284.502.137	327.857.827	-	-	-	96,12%	92,11%	-	-	-	327.857.826	327.857.826
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	204.000.000	110.000.000	-	-	-	189.323.022	99.515.289	-	-	-	92,81%	90,47%	-	-	-	99.515.288	99.515.288
Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000	20.000.000	-	-	-	19.243.000	19.080.000	-	-	-	96,22%	95,40%	-	-	-	19.079.999	19.079.999
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	518.223.750	531.964.920	-	-	-	503.261.258	512.527.363	-	-	-	97,11%	96,35%	-	-	-	512.527.362	512.527.362
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000	70.000.000	-	-	-	70.029.708	58.352.993	-	-	-	87,54%	83,36%	-	-	-	58.352.992	58.352.992

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	184.000.000	185.000.000	-	-	-	180.428.500	181.040.700	-	-	-	98,06%	97,86%	-	-	-	181.040.699	181.040.699
Pengadaan Perlengkapan Kantor	239.223.750	256.964.920	-	-	-	238.613.050	253.283.670	-	-	-	99,74%	98,57%	-	-	-	253.283.669	253.283.669
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000	20.000.000	-	-	-	14.190.000	19.850.000	-	-	-	94,60%	99,25%	-	-	-	19.849.999	19.849.999
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	25.000.000	-	-	-	19.155.800	24.727.475	-	-	-	95,78%	98,91%	-	-	-	24.727.474	24.727.474
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000	25.000.000	-	-	-	19.155.800	24.727.475	-	-	-	95,78%	98,91%	-	-	-	24.727.474	24.727.474
Program Pemanfaatan dan Pengembang an Teknologi Informasi	1.900.600.000	-	-	-	-	1.627.246.612	-	-	-	-	85,62%	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah	585.600.000	-	-	-	-	332.784.359	-	-	-	-	56,83%	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Aplikasi	300.000.000					289.217.253					96,41%						
Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah	1.000.000.000					998.120.000					99,81%						
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000					7.125.000					47,50%						
Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika	115.000.000	297.233.050	-	-	-	114.486.000	287.148.700	-	-	-	99,55%	96,61%	-	-	-	287.148.699	287.148.699
Pengembangan E-Government	115.000.000	-	-	-	-	114.486.000	-	-	-	-	99,55%	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government	-	295.000.000	-	-	-	-	284.915.650	-	-	-	-	96,58%	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penyelenggara an Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	-	1.909.650	-	-	-	-	1.909.650	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	-	323.400	-	-	-	-	323.400	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informatika	50.000.000	67.000.000	-	-	-	47.880.837	61.627.550	-	-	-	95,76%	91,98%	-	-	-	61.627.549	61.627.549
Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	50.000.000	67.000.000	-	-	-	47.880.837	61.627.550	-	-	-	95,76%	91,98%	-	-	-	61.627.549	61.627.549
Program Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	25.000.000	-	-	-	-	24.698.000	-	-	-	-	98,79%	-	-	-	-	-
Implementasi Sistem Informasi Desa	-	25.000.000	-	-	-	-	24.698.000	-	-	-	-	98,79%	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-	2.757.000.000	-	-	-	-	2.599.094.057	-	-	-	-	94,27%	-	-	-	-	-
Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	1.970.000.000	-	-	-	-	1.857.046.130	-	-	-	-	94,27%	-	-	-	-	-
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	-	377.000.000	-	-	-	-	339.950.527	-	-	-	-	90,17%	-	-	-	-	-
Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	-	410.000.000	-	-	-	-	402.097.400	-	-	-	-	98,07%	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.229.500.000	-	-	-	-	1.969.954.485	-	-	-	-	88,36%	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Kemitraan informasi dan Komunikasi	164.000.000	-	-	-	-	127.802.000	-	-	-	-	77,93%	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	955.000.000	-	-	-	-	807.921.593	-	-	-	-	84,60%	-	-	-	-	-	-
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	706.000.000	-	-	-	-	635.996.405	-	-	-	-	90,08%	-	-	-	-	-	-
LPPL Radio Magetan Indah	204.500.000	-	-	-	-	200.847.534	-	-	-	-	98,21%	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Media Center	200.000.000	-	-	-	-	197.386.953	-	-	-	-	98,69%	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	1.287.393.955	-	-	-	-	1.111.820.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	-	47.500.000	-	-	-	-	38.587.930	-	-	-	-	81,24%	-	-	-	-	-
Produksi Konten Informasi Publik	-	202.000.000	-	-	-	-	189.842.420	-	-	-	-	93,98%	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	79.187.000	-	-	-	-	57.688.950	-	-	-	-	72,85%	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	-	464.231.305	-	-	-	-	410.356.400	-	-	-	-	88,39%	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	50.000.000	-	-	-	-	36.365.300	-	-	-	-	72,73%	-	-	-	-	-
Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	-	300.000.000	-	-	-	-	271.481.108	-	-	-	-	90,49%	-	-	-	-	-
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	-	129.475.650	-	-	-	-	92.855.250	-	-	-	-	71,72%	-	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	-	15.000.000	-	-	-	-	14.643.300	-	-	-	-	97,62%	-	-	-	-	-
Program pengembangan data/informasi /statistik	230.000.000	182.100.000	-	-	-	228.239.810	158.718.700	-	-	-	99,23%	87,16%	-	-	-	158.718.699	158.718.699

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
daerah																	
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	75.000.000	52.100.000	-	-	-	74.966.500	38.763.325	-	-	-	99,96%	74,40%	-	-	-	38.763.324	38.763.324
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	155.000.000	130.000.000	-	-	-	153.273.310	119.955.375	-	-	-	98,89%	92,27%	-	-	-	119.955.374	119.955.374
Program Pengembangan Persandian	50.000.000	-	-	-	-	45.451.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Persandian	50.000.000	-	-	-	-	45.451.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	85.000.000	-	-	-	-	22.520.050	-	-	-	-	26,49%	-	-	-	-	-
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi	-	25000000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	-	25000000	-	-	-	-	19.649.650	-	-	-	-	78,60%				-	-
Audit Keamanan Informasi	-	25000000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-		-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	-	10000000	-	-	-	-	2.870.400	-	-	-	-	28,70%	-	-	-	-	-

Berdasarkan penyajian tabel T-C. 24 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik untuk Program di tahun 2019 dan 2020 ada perubahan penyusunan berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri. Sesuai Surat dari Bangda Nomor : 046/219/Bangda tanggal 17 Januari 2019 perihal Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, maka Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2020 menjadi “ **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** “, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di tahun 2020 menjadi ” **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**”.

Surat Nomor : 046/217/Bangda tanggal 17 Januari 2019 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian, maka Program Pengembangan Persandian Tahun 2020 menjadi “**Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**”. Surat Nomor : 120/066/Bangda tanggal 7 Januari 2019 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik, tidak ada perubahan program karena sudah sesuai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Keinginan masyarakat akan pelayanan informasi publik yang lebih baik, sehingga ketersediaan aplikasi pendukung sangat diperlukan, Serta mengembangkan pelayanan informasi publik supaya lebih baik lagi. Layanan informasi Publik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yaitu WANI BARES (Melalui Wa), SP4N LAPOR, PPID
2. Kurangnya pemahaman seluruh stakeholder, pimpinan dan staf, tentang peran strategis e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Belum ada regulasi terkait pelaksanaan E-Governmen Kabupaten Magetan Khususnya TIK
4. Pembangunan Jaringan FIXED BROADBAND (FO) seluruh perangkat daerah Kab. Magetan belum menyeluruh
5. Optimalisasi Data Center Kab. Magetan
6. Peningkatan infrastruktur dan kualitas pengamanan informasi
7. Pemahaman SDM terhadap pentingnya keamanan informasi masih terbatas.

b. Peluang

Sedangkan beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Magetan Lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, dan mudah diakses secara cepat dan murah. Seperti Layanan informasi Publik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yaitu WANI BARES (Melalui Wa), SP4N LAPOR, PPID . Untuk Layanan tersebut sudah terampu pada Sub kegiatan di Restra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 “Pelayanan Informasi Publik” .
2. Berkembangnya aplikasi open source yang lebih ekonomis, dan semakin banyak aplikasi e-gov yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah lain yang bisa diadopsi. Pada kegiatan tersebut sudah terampu pada Sub kegiatan di Restra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 “Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan rencana anggaran” .
3. Terdapat komitmen dan dukungan kepala daerah tentang penerapan e-government dan pengembangan data statistik sektoral serta Melakukan Metadata Statistik Sektoral.
4. Menguatnya kebijakan SPBE secara nasional (adanya Perpres 95/2018) perlu dimanfaatkan Pemerintah Daerah.
5. Pengembangan Aplikasi secara mandiri untuk pelaksanaan SPBE
6. Tersedianya Blue Print untuk pedoman pelaksanaan e-government

7. Tersedianya DRC (Disaster Recovery Center) yang berfungsi untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja.
8. Ketersediaan Data Center
9. Adanya peningkatan kapasitas server untuk colocation aplikasi SPBE

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan e-government belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintahan keterbukaan informasi publik dan layanan publik.
2. Belum optimalnya pemanfaatan media sebagai sarana penyebarluasan informasi , khususnya website pemerintah daerah.
3. Masih belum berkualitasnya data dan informasi yang akurat update dan terintegasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Lemahnya kebijakan tata kelola keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah.

Dari beberapa permasalahan/kendala tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan guna mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan perlu menyusun perencanaan strategis (Renstra) untuk tahun mendatang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018-2023 yaitu :

“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Magetan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Masyarakat Magetan yang **SMART** merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (entrepreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Di tindaklanjuti dengan 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Dalam rangka mendukung dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Periode 2018 – 2023 maka Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Tugas dan Fungsi melaksanakan misi ke- 5 yaitu :

“Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil “ yang mengandung maksud, Misi ini memiliki arah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat yang adil. Pelayanan masyarakat ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju good governance.

Tabel III. 2. 1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023

VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5	Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-government

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019-2024 bahwa program utama nasional bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
- b. Tersedianya akses broadband nasional internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pendidikan sosial budaya pertahanan dan keamanan.
- c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien berdaya saing dan aman.
- d. Terciptanya budaya pelayanan revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementrian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas bersih efektif dan efisien.

Mengacu pada program utama Kementrian Komunikasi dan Informatika tersebut diatas pada dasarnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan dan permasalahan yang akan di tuntaskan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi;
7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;
8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi;

3.3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sasaran jangka menengah rencana strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur implikasi rencana tata ruang dan wilayah

serta kajian lingkungan hidup strategis, maka dengan metode analisa SWOT dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis IT;
- b. Memanfaatkan SDM bidang komunikasi untuk mendukung tersedianya data dan informasi serta penyebarluasannya;
- c. Menguatkan regulasi komunikasi dan tata kelola TIK;
- d. Mengintegrasikan data antar SKPD dan pengembangan teknologi informasi untuk meminimalkan kerusakan data dan kejahatan dunia maya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Merujuk pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 – 2032. Dalam Rencana Struktur Ruang wilayah, terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Untuk sistem pusat kegiatan itu sendiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dimana untuk sistem perkotaan ditelaah atas pusat perkotaan dan wilayah layanannya. rencana fungsinya dan pengembangan fasilitas yang ada di kawasan perkotaan itu sendiri.

Terdapat istilah yang dimaksudkan sebagai klasifikator antara kelompok yang dibedakan dengan melihat dari segi fungsinya yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK).

Kecamatan Magetan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pemerintahan. pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta industri. Keputusan tersebut cukup rasional, mengingat Kecamatan Magetan pada peta memiliki posisi yang cukup strategis sebagai pusat kota. Dari segi efektivitas dan efisiensi posisi tersebut sangat memungkinkan kemudahan akses dari wilayah-wilayah sekitar ke pusat kabupaten. Kemudian untuk wilayah yang termasuk Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Parang.

Selanjutnya adalah wilayah Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK) dimana yang termasuk wilayahnya yaitu Kec. Panekan, Kec. Ngariboyo, Kec. Barat, Kec. Kartoharjo, Kec. Karas, Kec. Sukomomro, Kec. Bendo, Kec. Takeran, Kec. Nguntoronadi, Kec. Lambeyan, Kec. Poncol, dan Kec. Sidorejo.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magetan memiliki 8 indikator yang perlu diisi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), capaian indikator tersebut diantara lain terdapat 75% atau sebanyak 6 indikator yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, indikator tersebut yaitu Proporsi penduduk terlayani mobile broadband, "Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet, (Proporsi rumah tangga dengan akses internet), Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. (persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki/menguasai handphone) dan beberapa indikator lainnya. Selanjutnya terdapat 22% atau sebanyak 2 indikator yang capaiannya tidak ada data, indikator tersebut yaitu Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband dan Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertanganani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 2 (dua) tahun ke depan.

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergi partisipatif dan akuntabel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Perlunya mengembangkan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik.
2. Ketersediaan data informasi dan statistik sektoral yang masih belum memadai dan belum terbentuknya metadata statistik sektoral.
3. Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam hal tersebut ada hambatan atau kendala dalam penyusunan Indeks SPBE yaitu :
 - Belum ada peraturan yang mengatur Arsitektur SPBE dari Kementerian
 - Belum adanya peraturan Bupati terkait Proses Bisnis
 - Untuk indikator audit TIK dalam aturan nasional belum ada lembaga swasta/negeri yang di tunjuk sebagai pemeriksa eksternal dalam audit TIK
4. Belum optimalnya pemanfaatan media sebagai sarana penyebarluasan informasi , khususnya website pemerintah daerah.
5. Ketersediaan dan kualitas data sektoral belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan data perencanaan pembangunan.

6. Jumlah kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang persandian belum mencukupi, serta belum adanya kelengkapan SOP terkait Keamanan Informasi.
7. Sarana prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika yang kurang memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang ke - Lima yaitu Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil. Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana diamanatkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dinas komunikasi memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik

b. Sasaran

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 2) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik
- 3) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah
- 4) Meningkatnya keamanan informasi daerah

Tabel T-C. 25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	10,00 %	40,00%	70,00 %	80,00 %	90,00 %
		Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	65,00 %	70,00%	75,00 %	80,00 %	85,00 %
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	60,00 %	70,00%	80,00 %	82,00 %	85,00 %
		Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	292,00 Angka	300,00 Angka	0	0	0
			Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	0	0	15,00 %	18,00 %	21,00 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi

- a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;
- b. Meningkatkan produksi konten daerah;
- c. Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD;
- d. Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD.

Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam tahun ke depan. Kebijakan dimaksud meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government;
- b. Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat;
- c. Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD;
- d. Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

**Tabel T-C.26.
Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan**

VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA			
MISI 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan produksi konten daerah	Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD	Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan. Pada Bab berikut ini kami sajikan Program Kegiatan sebelum dan sesudah Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini :

Tabel T-C. 27
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	
SEBELUM PERUBAHAN																			
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	01.01.01	Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan %	17	32	1.540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1.540.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (Termasuk UPTD) yang terkoneksi jaringan FO OPD	10	13	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	225.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.2	Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan aplikasi	20	20	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
		1.1.1.3	Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah	Jumlah Data Center yang dikelola data center	1	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah OPD yang dimonitoring OPD	47	47	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		01.01.02	Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City %	0	20	115.000.000	40	300.000.000	0	60	415.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
		1.1.2.1	Pengembangan E-Government	Jumlah Layanan layanan	3	3	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	115.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.2	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE OPD	0	0	0	9	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	36	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.3	Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government	Jumlah tata kelola SPBE yang telah disusun dokumen	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	31	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		1.1.2.4	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city kali	0	0	0	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	22	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.5	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Jumlah sosialisasi dan promosi layanan publik berbasis elektronik kali	0	0	0	2	35.000.000	0	0	0	0	0	0	8	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPBE	Jumlah dokumen monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE yang disusun dokumen	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	4	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		01.01.03	Progam Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD dan pemerintah desa yang memiliki sumber daya bidang Kominfo %	0	50	50.000.000	55	75.000.000	0	0	0	0	0	0	80	125.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.3.1	Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta pelatihan bidang Kominfo orang	6(kali)	120	50.000.000	160	75.000.000	0	0	0	0	0	0	280	125.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		01.01.04	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa	Persentase desa yang menerapkan sistem informasi desa %	0	0	0	50	71.000.000	0	0	0	0	0	0	100	71.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.4.1	Implementasi Sistem Informasi Desa	Jumlah desa yang menerapkan sistem informasi desa desa	0	0	0	207	71.000.000	0	0	0	0	0	0	207	71.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		01.01.05	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan %	23,68	0	0	68,42	2.800.000.000	0	0	0	0	0	0	100	2.800.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.5.1	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO OPD	0	0	0	30	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	47	2.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.5.2	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola aplikasi	0	0	0	46	300.000.000	0	0	0	0	0	0	64	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		
		1.1.5.3	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Data Center yang dikelola data center	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan II %	0	0	0	0	0	78,94	2.282.001.615	86,84	3.680.500.000	0	0	90	5.962.501.615	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City II %	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO II OPD	0	0	0	0	0	4	1.325.574.800	10	2.830.500.000	0	0	14	4.156.074.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO II	0	0	0	0	0	4	1.325.574.800	10	2.830.500.000	0	0	14	4.156.074.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
				OPD														
		2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE II Dokumen	0	0	0	0	0	10	956.426.815	10	850.000.000	0	0	10	1.806.426.815	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 3.2.02. 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola SPBE yang telah disusun II Dokumen	0	0	0	0	0	1	46.300.000	1	100.000.000	0	0	2	146.300.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 3.2.02. 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Data Center yang dikelola II Data Center	0	0	0	0	0	1	579.999.615	1	200.000.000	0	0	1	779.999.615	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 3.2.02. 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan II Aplikasi	0	0	0	0	0	53	195.000.000	60	235.000.000	0	0	60	430.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 3.2.02. 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan	Jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city II Kali	0	0	0	0	0	2	30.127.200	2	100.000.000	0	0	4	130.127.200	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
			Kota Cerdas															
		2.16.0 3.2.02. 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta pelatihan bidang Kominfo Il Orang	0	0	0	0	0	200	75.000.000	240	150.000.000	0	0	440	225.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 3.2.02. 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE Il OPD	0	0	0	0	0	55	30.000.000	55	50.000.000	0	0	55	80.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 3.2.02. 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE yang disusun Il Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SETELAH PERUBAHAN																		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City Il %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	3.935.500.000	80	3.935.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2.16.0 3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO II OPD	0	0	0	0	4	0	0	0	17	2.960.500.000	17	2.960.500.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.01. 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah II unit	0	0	0	0	0	0	0	0	155	2.960.500.000	155	2.960.500.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	975.000.000	1	975.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
				n Daerah Kabupaten/ Kota														
		2.16.0 3.2.02. 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola II unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 3.2.02. 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan II Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	235.000.000	70	235.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 3.2.02. 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart CityII Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
		2.16.0 3.2.02. 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerahll Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	175.000.000	2	175.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA
		2.16.0 3.2.02. 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) ll Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA
		2.16.0 3.2.02. 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaran SPBE ll Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
SEBELUM PERUBAHAN																		
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	01.02.01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan desiminasi kebijakan/kegiatan pemerintah daerah %	50	65	1.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65	1.450.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.1.1	Pengembangan Kemitraan informasi dan Komunikasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina kelompok	10	11	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.1.2	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah media yang diikat kerjasama dalam penyuluhan kepada masyarakat kali	5	7	655.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	655.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.1.3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah update informasi pembangunan daerah kali	365	365	325.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	265	325.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.1.4	LPPL Radio Magetan Indah	Jumlah jam siaran Jam	7248	7248	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7248	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
		1.2.1.5	Pengembangan Media Center	Jumlah media center yang dikelola unit	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		01.02.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik %	0	0	0	70	2.795.000.000	0	85	2.795.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
		1.2.2.1	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dipantau media media	9	9	0	9	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.2.2	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah produksi konten informasi publik konten	0	0	0	365	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	365	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.2.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah KIM yang dibina kelompok	0	0	0	15	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	24	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.2.4	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	Jumlah media untuk penyebaran informasi media	0	0	0	8	1.480.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8	1.480.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		1.2.2.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah media massa yang dilibatkan dalam publikasi pembangunan daerah media	0	0	0	47	100.000.000	0	0	0	0	0	0	47	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.2.6	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah media komunikasi milik Pemerintah Daerah media	0	0	0	6	250.000.000	0	0	0	0	0	0	6	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.2.7	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah sengketa informasi kasus	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.2.8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi komunikasi publik yang disusun dokumen	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	4	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik II %	0	0	0	0	0	75	1.166.528.190	80	3.408.161.000	0	0	80	4.574.689.190	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui media informasi dan komunikasi I %	0	0	0	0	0	75	1.166.528.190	80	3.408.161.000	0	0	80	4.574.689.190	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dipantau II Media	0	0	0	0	0	5	34.805.750	5	100.000.000	0	0	5	134.805.750	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah produksi konten informasi publik II Konten	0	0	0	0	0	365	20.320.000	700	200.000.000	0	0	1.065	220.320.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi milik Pemerintah Daerah yang dikelola II Media	0	0	0	0	0	1	354.463.750	2	450.000.000	0	0	2	804.463.750	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
		2.16.0 2.2.01. 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi yang ditangani II Layanan	0	0	0	0	0	3	43.931.700	3	100.000.000	0	0	3	143.931.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 2.2.01. 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah media untuk penyebaran informasi II Media	0	0	0	0	0	8	621.177.900	8	2.193.161.000	0	0	8	5.935.516.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 2.2.01. 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM Pelatihan tenaga komunikasi publik II Orang	0	0	0	0	0	40	52.941.600	45	200.000.000	0	0	85	252.941.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 2.2.01. 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah media dan komunitas yang mendukung Desiminasi Informasi II Komunitas	0	0	0	0	0	2	38.887.490	2	150.000.000	0	0	2	377.774.980	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 2.2.01. 13	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi komunikasi publik yang disusun II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
SETELAH PERUBAHAN																		
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik II %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	3.715.000.000	85	3.715.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui media informasi dan komunikasi I %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	3.715.000.000	85	3.715.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.000.000	3	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	200.000.000	12	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2.16.0 2.2.01. 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ll Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	450.000.000	2	450.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 2.2.01. 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik ll Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.000.000	3	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 2.2.01. 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media ll Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.500.000.000	8	2.500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 2.2.01. 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasny all Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	200.000.000	45	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		2.16.0 2.2.01. 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakanll Komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	150.000.000	2	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 2.2.01. 13	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah ll Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEBELUM PERUBAHAN																		
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	01.03.01	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral %	50	60	230.000.000	70	230.000.000	0	0	0	0	0	0	100	460.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
		1.3.1.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah OPD yang membuat dan mengumpulkan data statistik sektoral OPD	46	27	75.000.000	27	75.000.000	0	0	0	0	0	0	27	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.3.1.2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan dokumen	3	3	155.000.000	3	155.000.000	0	0	0	0	0	0	3	310.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral II %	0	0	0	0	0	80	231.450.000	82	1.125.000.000	0	0	85	2.531.450.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan II Dokumen	0	0	0	0	0	3	231.450.000	3	1.125.000.000	0	0	6	1.356.450.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
		2.20.0 2.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan II Dokumen	0	0	0	0	0	3	161.450.000	3	225.000.000	0	0	6	386.450.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.20.0 2.2.01. 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang membuat dan mengumpulkan data statistik sektoral II OPD	0	0	0	0	27	70.000.000	27	150.000.000	0	0	27	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan II Orang	0	0	0	0	0	0	5	100.000.000	0	0	5	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral II Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	1	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2.20.0 2.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Dokumen Regulasi Satu Data Indonesia II Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	0	0	1	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
SETELAH PERUBAHAN																		
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	2.20.0 2.2.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral II %	0	0	0	0	0	0	0	0	93	1.175.000.000	93	1.175.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.175.000.000	3	1.175.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	0	0	0	0	0	0	0	0	3	250.000.000	3	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
				Diseminasi Data Statistik Sektoral II Dokumen														
		2.20.0 2.2.01. 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS II orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	175.000.000	27	175.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA
		2.20.0 2.2.01. 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi II Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
SEBELUM PERUBHAAN																		
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	01.04.01	Program Pengembangan Persandian	Cakupan pelayanan persandian %	3,57	30	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.1.1	Penyelenggaraan Persandian	Jumlah OPD yang mempunyai kebijakan keamanan informasi (termasuk bagian) OPD	57	55	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		01.04.02	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan keamanan dan pengamanan informasi %	0	0	0	45	120.000.000	0	0	0	0	0	0	60	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.2.1	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah dokumen kebijakan keamanan informasi dokumen	0	0	0	9	30.000.000	0	0	0	0	0	0	36	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.2.2	Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	Jumlah peserta literasi keamanan informasi orang	0	0	0	100	25.000.000	0	0	0	0	0	0	400	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		1.4.2.3	Pengembangan Layanan dan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang diamankan OPD	0	0	0	55	25.000.000	0	0	0	0	0	0	55	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.2.4	Audit Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang diaudit Informasinya OPD	0	0	0	55	25.000.000	0	0	0	0	0	0	55	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.2.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi yang disusun dokumen	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	4	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi %	0	0	0	0	0	15	85.000.000	18	365.000.000	0	0	18	450.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/K	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	0	0	0	0	0	55	85.000.000	55	365.000.000	0	0	55	450.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
			ota	Daerah II OPD														
		2.21.0 2.2.01. 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan keamanan informasi II Dokumen	0	0	0	0	0	1	25.000.000	1	50.000.000	0	0	2	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.0 2.2.01. 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Dokumen Audit Informasi II Dokumen	0	0	0	0	0	1	40.000.000	1	250.000.000	0	0	2	290.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.0 2.2.01. 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan pengamanan informasinya II OPD	0	0	0	0	0	55	20.000.000	55	50.000.000	0	0	55	70.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.0 2.2.01. 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
			Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	informasi yang disusun II Dokumen														
SETELAH PERUBAHAN																		
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	365.000.000	60	365.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah II OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	365.000.000	54	365.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
		2.21.0 2.2.01. 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ll Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.0 2.2.01. 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi ll OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	50.000.000	54	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.0 2.2.01. 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ll Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
SEBELUM PERUBAHAN																		
	Program / Kegiatan Rutin	01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	79,28	80	420.000.000	80,25	525.000.000	0	0	0	0	0	0	80,35	945.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran bulan	12	12	276.000.000	12	300.000.000	0	0	0	0	0	0	12	576.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Tercukupinya perjalanan dinas bulan	12	12	124.000.000	12	200.000.000	0	0	0	0	0	0	12	324.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen IKM dokumen	1	1	20.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	2	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak dan berfungsi %	80	80	195.000.000	80	330.000.000	0	0	0	0	0	0	80	525.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas paket	12	12	40.000.000	12	60.000.000	0	0	0	0	0	0	12	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		2.1.2.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor kali	1	1	20.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	5	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.1.2.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	35	40	125.000.000	40	150.000.000	0	0	0	0	0	0	120	275.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.1.2.4	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor unit	12	30	10.000.000	30	20.000.000	0	0	0	0	0	0	45	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		03.01.03	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, Kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	20.000.000	100	25.000.000	0	0	0	0	0	0	100	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		3.1.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian	Jumlah dokumen dokumen	8	8	20.000.000	8	25.000.000	0	0	0	0	0	0	40	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Kinerja Perangkat daerah														ATIKA	
		04.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi %	0	0	0	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		4.1.4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mempunyai sertifikat keahlian bidang komunikasi dan informatika orang	0	0	0	4	50.000.000	0	0	0	0	0	0	16	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat II (Angka)	0	0	0	0	0	80,5	4.839.889.372	80,75	5.690.932.069	0	0	80,75	10.530.821.441	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu II Dokumen	0	0	0	0	0	8	44.000.000	8	49.000.000	0	0	16	93.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		2.16.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Il Dokumen	0	0	0	0	0	5	22.000.000	5	27.000.000	0	0	10	49.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Il Dokumen	0	0	0	0	0	3	22.000.000	3	22.000.000	0	0	6	44.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Il Dokumen	0	0	0	0	0	1	3.300.593.069	1	3.300.593.069	0	0	2	6.601.186.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah yang disusun Il Dokumen	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	0	0	2	2.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN Il Bulan	0	0	0	0	0	12	3.299.593.069	12	3.299.593.069	0	0	24	6.599.186.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi II Orang	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000	0	0	12	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi II Orang	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000	0	0	12	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran II Bulan	0	0	0	0	12	243.277.405	12	353.427.000	0	0	24	596.704.405	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran II Bulan	0	0	0	0	12	7.998.925	12	20.000.000	0	0	24	27.998.925	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor II Bulan	0	0	0	0	12	111.994.110	12	174.927.000	0	0	24	286.921.110	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran II Bulan	0	0	0	0	12	6.991.570	12	7.000.000	0	0	24	13.991.570	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		2.16.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran II Bulan	0	0	0	0	0	12	26.492.800	12	30.000.000	0	0	24	56.492.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran II Bulan	0	0	0	0	0	12	16.500.000	12	18.000.000	0	0	24	34.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran II Bulan	0	0	0	0	0	12	3.300.000	12	3.500.000	0	0	24	6.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya perjalanan dinas II Bulan	0	0	0	0	0	12	70.000.000	12	100.000.000	0	0	24	170.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II Bulan	0	0	0	0	0	12	0	12	300.000.000	0	0	24	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		2.16.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Bulan	0	0	0	0	0	12	1.073.945.698	12	1.334.912.000	0	0	24	2.408.857.698	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran II Bulan	0	0	0	0	0	12	159.347.448	12	185.000.000	0	0	24	344.347.448	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor II Bulan	0	0	0	0	0	12	15.530.000	12	30.000.000	0	0	24	45.530.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran II Bulan	0	0	0	0	0	13	899.068.250	13	1.119.912.000	0	0	39	1.011.059.450	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Bulan	0	0	0	0	0	12	178.073.200	12	303.000.000	0	0	24	481.073.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		2.16.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan II Unit	0	0	0	0	0	1	36.640.000	1	40.000.000	0	0	3	76.640.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan II Unit	0	0	0	0	14	33.555.000	14	50.000.000	0	0	28	83.555.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi gedung kantor II Paket	0	0	0	0	2	107.878.200	2	213.000.000	0	0	4	320.878.200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
SETELAH PERUBAHAN																		
	Program / Kegiatan Rutin	2.16.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat II (Angka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	5.883.093.069	81	5.883.093.069	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2.16.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	49.000.000	7	49.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27.000.000	5	27.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22.000.000	2	22.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.300.593.069	1	3.300.593.069	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
				Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD II Dokumen														
		2.16.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN II Orang/bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3.299.593.069	40	3.299.593.069	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi II Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	16	50.000.000	16	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan II Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	16	50.000.000	16	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran II Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	12	418.500.000	12	418.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2.16.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan II Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	30.000.000	4	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor II Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	200.000.000	12	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan II Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan II Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	35.000.000	12	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan II Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20.000.000	3	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
		2.16.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan II Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.500.000	2	3.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD II Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	120.000.000	12	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	300.000.000	12	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional atau lapangan II Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2.16.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan II Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan II Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan II Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.150.000.000	1	1.150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	365.000.000	12	365.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya II Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45.000.000	1	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya II Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	70.000.000	14	70.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et		Rp.
		2.16.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi Il Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA
JUMLAH							4.050.000.000		7.321.000.000		8.604.869.177		14.269.593.069		15.073.593.069		49.319.055.315	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	0	10,00	40,00	70,00	80,00	90,00	90,00
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	-	2	2.2	2.4	2.8	3
3.	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	0	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
	STATISTIK							
4.	Persentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	0	60,00	70,00	80,00	82,00	85,00	85,00
	PERSANDIAN							
5.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	0	292 Angka	300 Angka	0	0	0	0
6.	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	0	0	0	15,00	18,00	21,00	21,00

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, akan tetapi mengalami perubahan di bidang urusan Persandian dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAGETAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	$\frac{\text{Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik}}{\text{Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa}} \times 100\%$
2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	$\frac{\text{Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola}}{\text{Jumlah media informasi}} \times 100$
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah OPD yang sudah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral}}{\text{Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral}} \times 100\%$
4	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi di banding jumlah OPD Kab. Magetan di kali 100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, September 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760520 199511 1 001